



**CATATAN *atas* LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud dan Tujuan
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Sistematika Penulisan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
BAB VI	P E N U T U P
LAMPIRAN	

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran .

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Guna pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 8 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- h. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2	Belanja Langsung	3.199.332.841	2.419.989.356	75,64
1.02.1.02.05.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	398.756.241	373.761.483	93,73
1.02.1.02.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.400.000	30.333.704	93,62
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.001	Belanja Telepon	1.200.000	690.065	57,51
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.002	Belanja Air	2.400.000	1.173.500	48,90
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.003	Belanja Listrik	28.800.000	28.470.139	98,85
1.02.1.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.000.000	60.600.000	77,69
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	78.000.000	60.600.000	77,69
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-		
1.02.1.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.945.200	67.942.000	100,00
1.02.1.02.05.01.08.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	65.000.000	65.000.000	100,00
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.945.200	2.942.000	99,89
1.02.1.02.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.050.000	5.030.000	99,60
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.050.000	5.030.000	99,60
1.02.1.02.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	53.379.391	53.370.000	99,98
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	52.164.391	52.155.000	99,98
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.01.004	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	1.215.000	1.215.000	100,00
1.02.1.02.05.01.09.5.2.	Belanja modal Pengadaan	-		

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.27.002	Mesin Hitung/ Jumlah			
1.02.1.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.217.850	11.339.600	79,76
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.001	Belanja cetak	1.726.600	1.705.000	98,75
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.002	Belanja penggandaan	12.491.250	9.634.600	77,13
1.02.1.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.528.800	3.525.500	99,91
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar/ baterai kering)	3.528.800	3.525.500	99,91
1.02.1.02.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang2an	9.680.000	9.630.000	99,48
1.02.1.02.05.01.15.5.2.2.03.005	Belanja surat kabar/ majalah	9.680.000	9.630.000	99,48
1.02.1.02.05.01.15.5.2.3.83.001	Belanja modal Pengadaan Umum	-		
1.02.1.02.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	18.565.000	18.420.000	99,22
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.001	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.440.000	7.300.000	98,12
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000	4.125.000	100,00
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.003	Belanja makan dan minum tamu	7.000.000	6.995.000	99,93
1.02.1.02.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45.265.000	44.284.979	97,83
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	9.440.000	8.554.979	90,62
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	35.825.000	35.730.000	99,73
1.02.1.02.05.01.20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	45.175.000	44.985.000	99,58
1.02.1.02.05.01.20.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.175.000	44.985.000	99,58
1.02.1.02.05.01.30	Penunjang Operasional Perencanaan &	25.550.000	24.300.700	95,11

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pelaporan			
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.01.004	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	-	-	-
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	1.200.000	1.168.500	97,38
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.06.001	Belanja cetak	665.000	375.000	56,39
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.06.002	Belanja penggandaan	4.040.000	3.477.200	86,07
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.08.001	Belanja sewa mobilitas darat	600.000	600.000	100,00
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000	1.870.000	97,14
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.270.000	10.260.000	99,90
1.02.1.02.05.01.30.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	6.850.000	6.550.000	95,62
1.02.1.02.05.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	155.631.850	153.016.329	98,32
1.02.02.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	49.412.000	48.467.018	98,09
1.02.1.02.05.02.05.5.2. 1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000	550.000	42,31
1.02.1.02.05.02.05.5.2. 3.17.001	Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor perorangan	48.112.000	47.917.018	99,59
1.02.1.02.05.02.07	Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor	23.972.500	23.427.900	97,73
1.02.1.02.05.02.07.5.2. 1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
1.02.1.02.05.02.07.5.2. 2.06.001	Belanja cetak	-	-	-
1.02.1.02.05.02.07.5.2. 2.06.002	Belanja penggandaan	-	-	-
1.02.1.02.05.02.07.5.2. 3.28.004	Belanja modal pengadaan alat pendingin	13.972.500	13.972.500	100,00
1.02.1.02.05.02.07.5.2. 3.29.001	Belanja modal pengadaan unit komputer/ jaringan	10.000.000	9.455.400	94,55
1.02.1.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	82.247.350	81.121.411	98,63
1.02.1.02.05.02.24.5.2. 1.02.002	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.000.000	21.000.000	100,00

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.02.24.5.2. 2.05.001	Belanja servis	9.000.000	8.964.200	99,60
1.02.1.02.05.02.24.5.2. 2.05.002	Belanja penggantian suku cadang	23.750.000	23.683.802	99,72
1.02.1.02.05.02.24.5.2. 2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas	24.447.350	24.332.209	99,53
1.02.1.02.05.02.24.5.2. 2.05.007	Belanja surat tanda nomor kendaraan	4.050.000	3.141.200	77,56
1.02.1.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.600.000	12.600.000	100,00
1.02.1.02.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	12.600.000	12.600.000	100,00
1.02.1.02.05.05.01.5.2. 2.23.001	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	12.600.000	12.600.000	
1.02.1.02.05.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.06.01	Monitoring dan evaluasi	-	-	-
1.02.1.02.05.06.01.5.2. 2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	-	-	
1.02.1.02.05.06.01.5.2. 2.06.001	Belanja cetak	-	-	
1.02.1.02.05.06.01.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	
1.02.1.02.05.15	Program pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan	198.643.800	195.839.536	98,59
1.02.1.02.05.15.1.3	Penyusunan laporan periodik volume sampah	63.427.450	63.113.133	99,50
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 1.02.003	Honorarium Pelaksana Kegiatan	26.000.000	26.000.000	
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	3.000.000	
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	6.130.850	6.126.533	99,93
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	400.000	400.000	100,00
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	121.600	121.600	100,00
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	10.800.000	10.500.000	97,22
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2.	Belanja perjalanan dinas			99,93

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.15.001	dalam daerah	15.100.000	15.090.000	
1.02.1.02.05.15.1.3.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.000	1.875.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Persampahan	135.216.350	132.726.403	98,16
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.01.001	Belanja alat tulis kantor	625.000	625.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.01.005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	38.635.000	38.635.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	6.758.850	6.528.903	96,60
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.750.000	5.750.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	960.000	960.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	400.000	400.000	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.07.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	12.900.000	11.700.000	90,70
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.11.004	Belanja Makan dan Minum Pelatihan	4.842.500	4.842.500	100,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.345.000	24.335.000	99,96
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 2.25.001	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	-	-	0,00
1.02.1.02.05.15.3.3.5.2. 3.17.006	Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda tiga	40.000.000	38.950.000	97,38
1.02.1.02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	792.636.650	783.580.095	98,86
1.02.1.02.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	55.602.850	55.540.312	99,89
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	13.200.000	13.200.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 1.02.002	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12.000.000	12.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	3.147.850	3.140.312	99,76
1.02.1.02.05.16.01.5.2.	Belanja Cetak			100,00

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.06.001		1.735.000	1.735.000	
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	175.000	175.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.600.000	6.600.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	1.100.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	2.800.000	2.800.000	100,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 1.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.820.000	5.815.000	99,91
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 1.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	9.025.000	8.975.000	99,45
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 1.20.001	Belanja hibah barang jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.01.5.2. 3.28.005	Belanja modal pengadaan alat dapur	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	78.393.000	75.074.134	95,77
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	5.648.000	5.629.134	99,67
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	6.160.000	6.160.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	285.000	285.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.300.000	6.000.000	64,52
1.02.1.02.05.16.04.5.2. .15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000	15.600.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	5.400.000	5.400.000	100,00
1.02.1.02.05.16.04.5.2. 3.27.005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	36.000.000	36.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.23	Peringatan Hari LH Sedunia di Kab.Pessel	55.260.000	54.042.000	97,80
1.02.1.02.05.16.23.5.2. 2.01.009	Belanja bahan material event perlombaan	32.500.000	31.500.000	96,92
1.02.1.02.05.16.23.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	9.360.000	9.342.000	99,81
1.02.1.02.05.16.23.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2. 2.07.002	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2. 2.10.005	Belanja Sewa Tenda	-	-	0,00

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.11.005	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	1.000.000	1.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.14.004	Belanja Pakaian Olahraga	12.400.000	12.200.000	98,39
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.20.002	Belanja hibah/barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	-		0,00
1.02.1.02.05.16.23.5.2.2.24.001	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	-		0,00
1.02.1.02.05.16.28	Penunjang Operasional laboratorium	385.301.700	384.004.209	99,66
1.02.1.02.05.16.28.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000	550.000	
1.02.1.02.05.16.28.5.2.1.02.002	Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap	48.000.000	48.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.347.000	2.347.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	5.465.900	5.396.703	98,73
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.02.005	Belanja Bahan Kimia	44.466.000	44.465.180	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.02.010	Belanja Bahan Laboratorium	27.000.000	26.908.970	99,66
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	320.000	292.500	91,41
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	397.800	396.000	99,55
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.03.018	Belanja listrik	3.100.000	3.090.556	99,70
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.03.012	Belanja uang saku dan penggantian transportasi	3.200.000	3.200.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.03.013	Belanja akomodasi	9.200.000	9.149.400	99,45
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.300.000	6.300.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	1.375.000	1.320.000	96,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.115.000	5.090.000	99,51
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	13.700.000	13.664.900	99,74
1.02.1.02.05.16.28.5.2.2.18.002	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	18.119.000	17.715.000	97,77

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.16.28.5.2. 2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	40.200.000	39.700.000	98,76
1.02.1.02.05.16.28.5.2. 3.28.004	Belanja modal pengadaan alat pendingin	-	-	-
1.02.1.02.05.16.28.5.2. 3.36.001	Belanja modal pengadaan alat laboratorium kimia air	148.346.000	148.346.000	100,00
1.02.1.02.05.16.28.5.2. 3.70.005	Belanja modal pengadaan air bersih/ air baku lainnya	2.100.000	2.072.000	98,67
1.02.1.02.05.16.39	Pembinaan Pelaksanaan KALPATARU & PROIKLIM	46.075.000	45.977.800	99,79
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	5.520.000	5.508.600	99,79
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	350.000	308.000	88,00
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	271.200	271.200	100,00
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	6.900.000	6.900.000	100,00
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.175.000	15.140.000	99,77
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	5.400.000	5.400.000	100,00
1.02.1.02.05.16.39.5.2. 2.25.001	Uang untuk diberikan kepada pihak ke-tiga	6.458.800	6.450.000	99,86
1.02.1.02.05.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	13.119.750	13.068.750	99,61
1.02.1.02.05.16.06.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	2.315.750	2.314.750	99,96
1.02.1.02.05.16.06.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	54.000	54.000	100,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000	3.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.06.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000	5.200.000	99,05
1.02.1.02.05.16.06.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	2.500.000	2.500.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42	Sosialisasi Adiwiyata (Sekola Berbudaya dan Berwawasan	125.904.000	123.642.540	98,20

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Lingkungan			
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	7.200.000	7.200.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 1.02.002	Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.000.000	12.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.01.001	Belanja alat tulis kantor	2.400.000	2.400.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	4.125.000	4.123.840	99,97
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.590.000	5.487.200	98,16
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.03.013	Belanja akomodasi	1.000.000	500.000	50,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	2.250.000	2.240.000	99,56
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	559.000	559.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000	2.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9.000.000	9.000.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	5.520.000	5.102.500	92,44
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	2.625.000	1.755.000	66,86
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.11.005	Belanja makanan dan minuman panitia	420.000	420.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	6.800.000	6.800.000	
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.615.000	18.555.000	99,68
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	7.550.000	7.550.000	100,00
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	5.250.000	4.950.000	94,285 714
1.02.1.02.05.16.42.5.2. 2.25.001	Uang untuk diberikan pada pihak ketiga	33.000.000	33.000.000	
1.02.1.02.05.16.31	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat bersih (GSB) tahun 2015	32.980.350	32.230.350	97,73
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	750.000	-	0,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	3.132.150	3.132.150	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	1.720.000	1.720.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	253.200	253.200	100,00

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.800.000	4.800.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000	5.400.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.375.000	9.375.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	2.550.000	2.550.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.25.009	Uang untuk diberikan pada masyarakat	5.000.000	5.000.000	100,00
1.02.1.02.05.19	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber daya Alam dan Lingkungan	692.142.300	637.743.963	92,14
1.02.1.02.05.19.07	Pembuatan Buku Laporan Status LH Daerah (LSLHD) Kab. PESSEL	97.006.500	94.177.400	97,08
1.02.1.02.05.19.07.5.2. 1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	600.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	2.624.000	2.329.900	88,79
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.03.013	Belanja akomodasi	-	-	-
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	-	-	-
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	356.000	356.000	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	#DIV/0!
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000	2.700.000	90,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	962.500	962.500	100,00
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.950.000	4.175.000	70,17
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	4.850.000	4.525.000	93,30
1.02.1.02.05.16.31.5.2. 2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	78.664.000	78.529.000	99,83
1.02.1.02.05.19.14	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	100.925.000	94.923.513	94,05
1.02.1.02.05.19.14.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	19.200.000	15.600.000	81,25

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 1.02.002	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	26.000.000	24.000.000	92,31
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	6.800.000	6.673.513	98,14
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	225.000	225.000	100,00
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	2.575.000	2.575.000	100,00
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.200.000	4.200.000	100,00
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.425.000	29.305.000	99,59
1.08.1.08.05.19.14.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	12.500.000	12.345.000	98,76
1.02.1.02.05.19.09	Inventarisasi Kegiatan yang Belum Memiliki Izin Lingkungan	25.835.000	25.802.700	99,87
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	6.000.000	6.000.000	100,00
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	2.400.000	2.392.700	99,70
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	135.000	135.000	100,00
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	200.000	200.000	100,00
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.200.000	4.200.000	100,00
1.02.1.02.05.19.09.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.900.000	12.875.000	99,81
1.02.1.02.05.19.17	Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat Bidang LH	24.894.000	23.758.250	95,44
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	4.400.000	4.026.750	91,52
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	-	-	-
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	669.000	669.000	100,00
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.400.000	2.400.000	100,00
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.08.002	Belanja sewa sarana mobilitas air	600.000	-	0,00
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	550.000	532.500	96,82
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.025.000	8.025.000	100,00
1.02.1.02.05.19.17.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	8.250.000	8.105.000	98,24

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.19.34	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	28.347.000	27.436.750	96,79
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	632.000	631.750	99,96
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	11.065.000	11.030.000	99,68
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	250.000	250.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	500.000	500.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000	1.200.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000	1.200.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.800.000	2.800.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.11.005	Belanja makanan dan minuman panitia	425.000	425.000	100,00
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.650.000	2.150.000	81,13
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	1.525.000	1.300.000	85,25
1.02.1.02.05.19.34.5.2.2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur	4.100.000	3.950.000	96,34
1.02.1.02.05.19.37	Penyusunan RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan	127.324.800	115.095.600	90,40
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	2.500.000	2.500.000	100,00
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	6.750.000	4.815.800	71,35
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	17.450.000	16.445.000	94,24
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	1.484.800	1.484.800	100,00
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	3.055.000	3.055.000	100,00
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.300.000	9.800.000	79,67
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.900.000	3.000.000	76,92
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	12.485.000	10.395.000	83,26
1.02.1.02.05.19.37.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000	3.550.000	86,59

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.19.37.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	12.100.000	12.100.000	100,00
1.02.1.02.05.19.37.5.2. 2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	51.200.000	47.950.000	93,65
1.02.1.02.05.19.38	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang	287.810.000	256.549.750	89,14
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.01.001	Belanja alat tulis kantor	10.000.000	7.500.000	75,00
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.01.004	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	690.000	690.000	100,00
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	11.790.700	6.552.650	55,57
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	25.400.000	20.150.000	79,33
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.06.001	Belanja Cetak	7.795.000	7.690.000	98,65
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.06.002	Belanja Penggandaan	4.999.200	4.999.200	100,00
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.07.003	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.200.000	7.200.000	100,00
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	5.400.000	4.500.000	83,33
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	13.325.000	11.550.000	86,68
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.875.000	3.900.000	43,94
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	24.125.000	23.700.000	98,24
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.15.003	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar prop	49.010.000	48.967.900	99,91
1.02.1.02.05.19.38.5.2. 2.24.002	Honorarium tenaga ahli/narasumber/Instruktur	119.200.100	109.150.000	91,57
1.02.1.02.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	948.922.000	263.447.950	27,76
1.02.1.02.05.20.40	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi(DAK)	848.465.000	184.200.000	21,71
1.02.1.02.05.20.40.5.2. 3.49.029	Belanja modal bangunan lainnya	651.465.000	-	0,00
1.02.1.02.05.20.40.5.2. 3.71.001	Belanja modal pengadaan Instalasi air kotor	197.000.000	184.200.000	93,50

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.1.02.05.20.08	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala kabupaten	100.457.000	79.247.950	78,89
1.02.1.02.05.20.08.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana kegiatan	6.000.000	5.500.000	91,67
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.01.006	Belanja bahan bakar minyak/gas	6.144.000	6.139.950	99,93
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.06.001	Belanja Cetak	1.100.000	1.030.000	93,64
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	483.000	447.000	92,55
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	10.500.000	9.600.000	91,43
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.985.000	17.585.000	97,78
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam prop	7.725.000	7.650.000	99,03
1.02.1.02.05.20.08.5.2.2.15.003	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar prop	18.520.000	-	0,00
1.02.1.02.05.20.08.5.2.1.24.001	Honorarium jasa tenaga kerja non pegawai	32.000.000	31.296.000	97,80
Jumlah		3.199.332.841	2.419.989.356	75,64

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

4.2.2. Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Kantor Lingkungan Hidup atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Investasi
- Ekuitas Dana Cadangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2015 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai aset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.953.537.220	1.969.336.690
	Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2019 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 1.969.336.690,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	1.240.215.520	1.343.633.890
	- Tambahan Penghasilan PNS	713.321.700	625.702.800
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.953.537.220	1.969.336.690
2.	Belanja Langsung	2.832.916.512	2.419.989.356
	Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Barang Modal. Sampai dengan Desember 2019 realisasi Belanja Langsung telah mencapai Rp. 2.419.989.356,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Honorarium PNS	141.700.000	147.800.000
	- Honorarium Non PNS	187.750.000	182.000.000
	- Uang Lembur	0	0
	Sub jumlah	329.450.000	329.800.000
	Belanja Barang/Jasa		
	Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	162.354.390	236.221.917
	- Belanja Bahan/Material	22.500.000	71.374.150
	- Belanja Jasa Kantor	69.687.531	114.765.860
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.006.977	60.121.411
	- Belanja Cetak dan	85.379.423	64.480.300

Penggandaan		
- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	13.240.000	20.200.000
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	98.700.000	97.200.000
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.772.000	-
- Belanja Makanan dan Minuman	69.612.500	82.585.000
- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.500.000	12.200.000
- Belanja Perjalanan Dinas	972.737.580	454.807.800
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	12.600.000
- Belanja Pemeliharaan	40.579.148	22.745.000
- Belanja Jasa Konsultansi	0	0
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	120.775.000	284.229.000
- Belanja Honorarium Non Pegawai	320.367.000	31.296.000
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat	91.500.000	44.450.000
Sub Jumlah	2.157.702.549	1.609.276.438

Belanja Modal 1.207.336.000 480.912.918

Belanja Modal Kantor Lingkungan Hidup sampai dengan Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. **1.005.909.198,-** dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Modal Peralatan		
Mesin	344.328.763	294.640.918
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	110.948.636	36.000.000
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	171.580.127	13.972.500
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	148.346.000
- Belanja Modal Pengadaan	12.475.000	9.455.400

Komputer		
- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	49.325.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	86.867.018
B. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.435.200	186.272.000
- Belanja Modal Pengadaan Buku	1.435.200	0
- Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/ Air Baku lainnya	0	2.072.000
- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	184.200.000
Sub Jumlah	345.763.963	480.912.918
Jumlah Belanja Langsung	2.832.916.512	2.419.989.356

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Persediaan	0	38.293.333
	Persediaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.38.293.333,- terdiri atas:		
	1. Alat Tulis Kantor	0	50.000
	2. Cetak	0	1.249.000
	3. Bahan Kimia	0	36.949.333
	Jumlah	0	38.293.333

5.2.2 Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Aset Tetap	6.544.884.172	6.515.948.672
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 6.515.948.672 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.544.884.172 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Tanah	111.000.000	111.000.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 tidak ada terjadi mutasi tambah.		
	2. Peralatan Dan Mesin	4.559.598.552	4.530.663.052
	- Alat -alat besar	66.927.062	
	- Alat-alat angkutan	869.763.072	
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.789.703	
	- Alat Pertanian	65.052.941	
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.821.061.396	
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	123.150.475	
	- Alat Laboratorium	1.573.853.903	
	Dalam tahun anggaran 2019 terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 28.935.500,-		
	3. Gedung Dan Bangunan	1.494.213.448	1.494.213.448
	- Bangunan Gedung	1.494.213.448	1.494.213.448

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.504.149	225.504.149
- Instansi Pembangkit Listrik	225.504.149	225.504.149
5. Aset Tetap Lainnya	154.568.023	154.568.023
- Buku	154.568.023	154.568.023

6.Akumulasi Penyusutan (3.893.671.671) (3.893.671.671)
Jumlah tersebut adalah jumlah akumulasi penyusutan yang terjadi selama tahun 2018 hingga Desember 2019.

5.2.3 Ekuitas Dana

1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(203.074.535)	(779.343.485)
2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.544.884.172	6.515.948.672
3.	Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	7.623.012.412,95	4.440.301.046
	JUMLAH EKUITAS DANA	13.964822.049,95	6.176.906.233

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, 2 Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. JUMSU TRISNO, S.P, M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG